



## KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

Nomor : Und-56/KSP/D.2/05/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Undangan Rapat

Jakarta, 8 Mei 2017

**Yth. (Daftar Undangan Terlampir)**  
Di Tempat

Dengan hormat,

Pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) yang dalam waktu dekat akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Stranas AK ini akan menggantikan Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Dalam rangka memastikan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya anti korupsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam *Focus Group Discussion* terkait peran partisipasi masyarakat:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Mei 2017  
Waktu : 15:00-17:00  
Tempat : Ruang Rapat Utama, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia  
Agenda : 1. Paparan singkat tentang draf Stranas AK oleh KSP-Bappenas-KPK;  
2. Diskusi identifikasi tantangan bagi masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
3. Diskusi strategi memastikan hadirnya kesempatan partisipasi masyarakat.

Apabila dibutuhkan informasi dan koordinasi teknis mengenai pertemuan ini silahkan menghubungi Sdr. Abraham Wirotomo ([abraham.wirotomo@ksp.go.id](mailto:abraham.wirotomo@ksp.go.id) 0812-993-56-888). Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Deputi II  
Kepala Staf Kepresidenan

Yanuar Nugroho



# KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

Lampiran Surat Undangan  
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan  
Nomor : Und-56/KSP/D.2/05/2017  
Tanggal : 8 Mei 2017

## Daftar Undangan:

1. Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kedepuyan Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sekretariat Stranas PPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Transparency Internasional Indonesia;
5. Indonesia Corruption Watch;
6. Kemitraan;
7. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia;
8. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan;
9. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia;
10. Masyarakat Transparansi Indonesia
11. Seknas FITRA
12. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia;
13. Indonesia Legal Roundtable;
14. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional; dan
15. Institute for Strategic Initiatives.

Deputi II  
Kepala Staf Kepresidenan

**Yanuar Nugroho**